

# **ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Sri Widati<sup>1</sup>, Irda Wati<sup>2</sup>**

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende

<sup>1</sup>sriwidati95@gmail.com

<sup>2</sup>Irda2666@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada BPKAD Kab. Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kab. Konawe telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permendagri NO. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci : Sistem; Sistem Pemerintahan

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the application of government accounting systems in accordance with Permendagri No.13 of 2006 and PP No. 24 of 2005. Data collection was carried out by interview and documentation. Data obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Kab. Konawe The analytical method used is a descriptive qualitative method that aims to understand the data obtained in the form of the application of government accounting systems in BPKAD Kab. Konawe. The results showed that BPKAD Kab. Konawe has implemented a government accounting system based on Permendagri No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management and PP No. 24 of 2005 concerning Government Accounting Standards.*

*Keywords: System; Government Accounting*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi telah memberi dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi

menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat dan aman. Salah satunya yaitu pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe merupakan salah satu pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwajibkan melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat SKPD maupun BPKAD untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi. Apabila sistem dilaksanakan dengan baik maka laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah, andal, tepat waktu dan akurat.

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintahan bagi BPKAD Kabupaten Konawe berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok dari permasalahan adalah apakah penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe telah disusun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005?

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian sistem akuntansi pemerintahan yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan sistem akuntansi pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005.

Adapun kegunaan penelitian yaitu untuk menambah bukti-bukti empiris mengenai analisis penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada BPKAD Kabupaten Konawe serta memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang serupa untuk menjadi bahan pengembangan dari ilmu tersebut.

## **LANDASAN TEORI dan KAJIAN EMPIRIS**

### **A. Sistem Akuntansi**

Mulyadi (2010:3) Sistem akuntansi adalah “organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa guna untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”, sedangkan Mulyadi (2010:5), sistem adalah “suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Mulyadi (2010:7), adapun unsur-unsur sistem akuntansi adalah sebagai berikut : a) Formulir; b) Jurnal; c) Buku Besar; d) Buku Pembantu; dan e) Laporan.

Secara umum, tujuan penyusunan sistem akuntansi bagi suatu instansi/perusahaan adalah untuk meningkatkan informasi yang tepat guna dan tepat waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk meningkatkan sistem pengendalian pembelian yang memadai dan untuk dapat membandingkan antara biaya yang telah dikeluarkan dengan manfaat yang telah dikeluarkan dengan manfaat yang telah diperoleh.

## B. Pengertian Pemerintah Daerah

Halim (2009:2), pemerintah daerah adalah “Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 (2004:1) “Penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemreintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (2006: 3) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”.

Pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

## C. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah SKPKD

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh BPKAD, yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintah daerah. Sedangkan Sistem Akuntansi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK SKPD. Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan SKPKD.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPD adalah sebagai berikut :

- a) Fungsi Akuntansi SKPKD, dalam kegiatan ini, fungsi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang dan selain kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait; 2) memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besar masing-masing; 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b) Bendahara di SKPKD, dalam kegiatan ini bendahara memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi BPKAD.

## KAJIAN EMPIRIS

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Riodinar Harianja (2008) dengan judul “*Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah pada SKPKD Kab. Toba Samosir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Winda Puspita Sari (2011) dengan penelitiannya yang berjudul “*Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang (Studi Pada kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di Pemerintah Kota Padang)*”. Anam, H., & Liyanto, L. (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi

keuangan SKPD di Kota Padang berada pada keadaan yang telah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006. Kesesuaian ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan. Adapun persamaan penelitian ini yakni meneliti kesesuaian buku besar, jurnal dan prosedur akuntansi dengan Permendagri No.13 Tahun 2006. Perbedaannya yakni Winda Puspita Sari mengambil objek penelitian pada Pemerintahan Kota Padang, dimana penelitian ini hanya meneliti kesesuaian analisa penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tidak dengan PP No. 24 Tahun 2005.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Objek Penelitian**

Husein Umar (2005:303), “Objek Penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu”.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe.

### **B. Jenis dan sumber Data**

Indriantoro (2013:146-147), Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tidak melalui media perantara. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Indriantoro dan Supomo (2013:147), data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip/dokumen yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2012), tehnik wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pengetahuan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit Metode dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: data barang, faktur, dan jurnal.

### **D. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Analisis Transaksi**

#### **1. Pendapatan**

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan ini antara lain pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer provinsi-bagi hasil lainnya dan lain-lain pendapatan yang sah antara lain dana hibah, dana darurat dan dana lainnya. Total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 667.968.284.094, pada tahun 2012 total pendapatan sebesar Rp. 763.550.450.439 dan pada tahun 2013 total pendapatan sebesar Rp. 869.322.116.876, dan dapat diartikan bahwa untuk total pendapatan setiap tahunnya terjadi peningkatan.

## **2. Belanja**

Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bagi dalam dua kelompok yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan belanja modal yaitu belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin (aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung, meja dan kursi kerja, lemari, dan lain sebagainya. Total belanja yang dikeluarkan pada tahun 2011 sebesar Rp.462.320.600.289, tahun 2012 sebesar Rp.549.115.264.362 dan tahun 2013 sebesar Rp.774.676.624.254.

## **3. Aset**

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh BPKAD, yaitu berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya. Untuk total aset tetap yang dikeluarkan pada tahun 2011 sebesar Rp.1.55.748.486.535, dan pada tahun 2012 total aset yang dikeluarkan sebesar Rp.1.660.319.492.646 dan pengeluaran aset tetap tahun 2013 sebesar Rp.1.807.090.839.550.

## **B. Sistem Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-Analisis Pencatatan**

### **1. Penerapan Akuntansi Belanja**

Pencatatan belanja pada BPKAD Kab. Konawe sudah dikelola sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk belanja uang persediaan/Ganti uang/Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun untuk belanja Langsung-Gaji dan tunjangan dan belanja langsung-Barang dan Jasa. BPKAD juga sudah menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Permendagri no.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **2. Penerapan Akuntansi Aset**

Aset yang dimaksud adalah aset tetap, dan akuntansi aset merupakan lanjutan dari akuntansi belanja yang menghasilkan aset tetap. Akuntansi aset pada BPKAD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan dan pengurangan nilai aset. Akuntansi aset ini telah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP no.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **C. Sistem Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-Analisis Pelaporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, BPKAD telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP no.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
- b. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.
- c. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan tentang informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja BPKAD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan BPKAD, Kebijakan akuntansi pada BPKAD, Penjelasan pos-pos keuangan, dan Penjelasan atas informasi non keuangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh pada BPKAD Kab. Konawe dapat disimpulkan bahwa BPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. S.900/316/BPKAD tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup.

Laporan keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan kepada BPKAD adalah untuk selalu konsisten berpedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan daerah. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga terwujud penyajian laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Serta perlunya peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah agar lebih terciptanya pengelolaan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, H., & Liyanto, L. (2019). Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(1), 130-149. Retrieved from <https://fem.uniba-bpn.ac.id/jurnal/index.php/geoekonomi/article/view/53>
- Bachtiar, arif dan Muchlis, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.
- Harianja, Rioldinar. 2008. *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hafiz, Abdul. 2007. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfa Beta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2001. *Standar Akuntansi Keuangan*. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.
- Laporan Keuangan BPKAD Kab. Konawe tahun Anggaran 2011-2013.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Umar, Husein. 2002. *Riset Akuntansi*. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.